

Analisis Implementasi Fungsi Diplomasi Batas Maritim Yang Dilaksanakan Oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (PUSHIDROSAL)

Yoyok Triono

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (SESKOAL)

Bram Rusman Namin

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (SESKOAL)

Gurtom Fatianto

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (SESKOAL)

Korespondensi penulis: *samudra120583@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of maritime boundary diplomacy conducted by the Hydro-Oceanography Center of the Indonesian Navy (Pushidrosal). The background of this research relates to the importance of establishing clear maritime boundaries for Indonesia as the largest archipelagic country, in order to safeguard sovereignty and effectively manage marine resources. The method used in this study is qualitative research, involving data collection through direct observation, interviews with Pushidrosal officials and hydro-oceanography experts, as well as analysis of related documents. The results indicate that Pushidrosal plays a crucial role in gathering and analyzing data to support Indonesia's maritime boundary claims, despite facing challenges such as limited resources and conflicts with neighboring countries. Recommendations for enhancing the effectiveness of maritime boundary diplomacy include increasing investment in survey technology, strengthening collaboration with other agencies, and involving the community in education about maritime boundaries.*

Keywords: *Maritime Boundary Diplomacy, Hydro-Oceanography Center, Pushidrosal, Sovereignty, Marine Resources.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi diplomasi batas maritim yang dilaksanakan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan pentingnya penetapan batas maritim yang jelas bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, guna menjaga kedaulatan dan mengelola sumber daya laut secara efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pejabat Pushidrosal dan ahli hidro-oseanografi, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pushidrosal berperan penting dalam pengumpulan dan analisis data untuk mendukung klaim batas maritim Indonesia, meskipun terdapat tantangan dalam keterbatasan sumber daya dan konflik dengan negara tetangga. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas diplomasi batas maritim mencakup peningkatan investasi dalam teknologi survei, memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain, dan melibatkan masyarakat dalam edukasi tentang batas maritim.

Kata Kunci: Diplomasi Batas Maritim, Pusat Hidro-Oseanografi, Pushidrosal, Kedaulatan, Sumber Daya Laut.

PENDAHULUAN

Diplomasi batas maritim merupakan suatu kegiatan penting dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan pengaturan batas wilayah laut antara negara-negara yang bersebelahan. Dalam batas maritim mencakup garis batas yang ditentukan oleh hukum internasional, terutama *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang disepakati pada tahun 1982. Fungsi utama dari diplomasi batas maritim adalah untuk mencegah sengketa teritorial, menjaga stabilitas kawasan, dan mempromosikan kerjasama antarnegara dalam pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan (Chadhafi, 2023). Dalam dunia yang semakin terhubung, dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya laut, dan dengan adanya teknologi yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih dalam, pentingnya diplomasi batas maritim menjadi semakin menonjol (Ahmad, 2022).

Salah satu fungsi kunci dari diplomasi batas maritim adalah pencegahan konflik. Ketika negara-negara memiliki klaim yang tumpang tindih atas wilayah laut, risiko terjadinya sengketa menjadi tinggi. Sengketa ini bisa berkisar dari hak atas sumber daya alam seperti minyak, gas, dan ikan, hingga jalur pelayaran yang strategis. Diplomasi batas maritim berfungsi sebagai platform untuk negosiasi dan penyelesaian damai, yang memungkinkan negara-negara untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Adikara & Munandar, 2021). Contohnya adalah perjanjian antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas laut di sekitar Kepulauan Sipadan dan Ligitan. Dengan adanya perjanjian tersebut, kedua negara dapat menghindari sengketa yang dapat merugikan kepentingan kedua belah pihak. Melalui proses negosiasi ini, negara-negara diharapkan dapat mengurangi ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar (Chadhafi, 2021).

Diplomasi batas maritim juga berfungsi untuk mempromosikan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya laut. Banyak negara memiliki ketergantungan pada sumber daya laut untuk perekonomian mereka. Dalam hal ini, kerjasama antarnegara sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dimanfaatkan secara berkelanjutan (Maulidina, 2021). Misalnya, dalam pengelolaan perikanan, negara-negara yang berbatasan dapat bekerja sama untuk mengatur penangkapan ikan dan melindungi ekosistem laut. Hal ini tidak hanya memastikan keberlanjutan sumber daya, tetapi juga meningkatkan hubungan diplomatik antarnegara. Melalui diplomasi batas maritim, negara-negara dapat melakukan pertemuan rutin untuk membahas isu-isu terkait pengelolaan sumber daya laut, berbagi informasi, dan membangun kepercayaan satu sama lain (Gara et al., 2023).

Diplomasi batas maritim memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional. Dalam banyak kasus, batas maritim yang tidak jelas atau belum ditetapkan dapat menjadi sumber ketegangan antara negara-negara. Ketidakpastian ini dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan ketegangan yang lebih besar di kawasan tersebut. Dengan melakukan diplomasi batas maritim yang efektif, negara-negara dapat bekerja sama untuk menetapkan batas-batas yang jelas dan terdefinisi, yang pada gilirannya akan membantu menjaga stabilitas di kawasan (Pangesti & Ilmih, 2024). Misalnya, di Laut China Selatan, adanya klaim tumpang tindih dari beberapa negara telah menciptakan ketegangan yang signifikan. Melalui diplomasi yang tepat, negara-negara yang bersangkutan dapat mencari solusi damai dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik militer (Louhenapessy & Raspati, 2021).

Diplomasi batas maritim juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan keamanan maritim. Dalam negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi ancaman yang dihadapi di laut, seperti pembajakan, penyelundupan, dan kerusakan lingkungan.

Dengan membangun kerjasama yang solid melalui diplomasi batas maritim, negara-negara dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk menjaga keamanan laut dan melindungi sumber daya mereka. Sebagai contoh, melalui forum regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF), negara-negara dapat berkolaborasi dalam masalah keamanan maritim, berbagi informasi intelijen, dan melakukan latihan bersama untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai ancaman di laut (Palar, 2021).

Diplomasi batas maritim juga dapat berfungsi dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut. Dalam banyak kasus, masyarakat pesisir dan nelayan lokal sangat bergantung pada ekosistem laut untuk mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memperhatikan hak-hak mereka dalam setiap perjanjian batas maritim. Melalui diplomasi yang inklusif, negara-negara dapat memastikan bahwa suara masyarakat lokal didengar dan diakomodasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Ini juga akan membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di kalangan masyarakat terhadap pelestarian sumber daya laut (Hanggarini et al., 2022).

Dalam era globalisasi dan perubahan iklim saat ini, diplomasi batas maritim semakin penting untuk membahas isu-isu lingkungan. Banyak negara di seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama, seperti pemanasan global, peningkatan permukaan air laut, dan pergeseran pola cuaca. Dalam negara-negara perlu bekerja sama untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut dan sumber daya yang ada. Diplomasi batas maritim dapat menjadi platform yang efektif untuk melakukan dialog dan kerjasama dalam isu-isu lingkungan, seperti perlindungan terumbu karang, pengelolaan limbah laut, dan pengurangan polusi. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil, diplomasi batas maritim dapat berkontribusi pada upaya global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (Sasmita et al., 2021).

Tantangan dalam diplomasi batas maritim tidak bisa diabaikan. Berbagai faktor seperti kepentingan nasional, politik dalam negeri, dan perbedaan budaya dapat mempengaruhi keberhasilan diplomasi ini. Beberapa negara mungkin memiliki kepentingan yang berbeda terkait dengan batas maritim, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam proses negosiasi. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk memiliki pendekatan yang fleksibel dan terbuka dalam melakukan diplomasi batas maritim. Melalui dialog yang konstruktif dan saling menghormati, negara-negara dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan dan membangun kepercayaan yang lebih kuat (Rahim & Burhanuddin, 2024).

Fungsi diplomasi batas maritim sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, mencegah konflik, dan mempromosikan kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya laut. Melalui proses negosiasi yang efektif, negara-negara dapat menetapkan batas yang jelas dan terdefinisi, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi ketegangan dan konflik. Diplomasi batas maritim juga memberikan platform untuk mengatasi isu-isu global, seperti perubahan iklim dan perlindungan lingkungan. Meskipun ada tantangan dalam proses ini, dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama yang kuat, diplomasi batas maritim dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai perdamaian dan kesejahteraan bagi negara-negara yang terlibat (Pramuji, 2022).

Dalam global yang semakin kompleks, permasalahan batas maritim menjadi salah satu isu strategis yang dihadapi Indonesia, yang dikenal sebagai negara *kepulauan* terbesar di dunia. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.000 km dan lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya rentan terhadap potensi konflik maritim dengan negara-

negara tetangga. Persoalan utama yang dihadapi oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) adalah kurangnya data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi *hidro-oseanografi* yang dapat digunakan untuk menetapkan batas maritim secara tepat. Selain itu, tantangan dalam diplomasi maritim juga mencakup perbedaan persepsi dengan negara tetangga mengenai batas wilayah, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya batas maritim, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki Pushidrosal dalam melakukan survei dan pemetaan. Dalam tujuan Pushidrosal dalam diplomasi batas maritim adalah untuk menghasilkan data dan peta yang akurat yang mendukung penetapan batas maritim yang jelas, serta memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi internasional. Meskipun Pushidrosal telah melaksanakan berbagai survei dan kegiatan pemetaan, terdapat *gap research* yang signifikan terkait dengan integrasi data *hidro-oseanografi* dalam kebijakan publik serta kolaborasi lintas sektoral. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk menjembatani *gap* tersebut, terutama dalam hal kolaborasi antara Pushidrosal dan instansi lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Informasi Geospasial, guna memaksimalkan potensi data yang ada. Urgensi penelitian ini menjadi sangat tinggi, mengingat pentingnya batas maritim bagi kedaulatan negara, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Dengan memahami dan menangani *gap* yang ada, Pushidrosal dapat meningkatkan efektivitas diplomasi batas maritim, yang pada gilirannya akan memperkuat kedaulatan dan integritas wilayah laut Indonesia di kancah internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis dan strategis bagi Pushidrosal dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam upaya menjaga dan memperjuangkan kepentingan maritim Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Fungsi Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim adalah alat penting dalam hubungan internasional yang digunakan oleh negara untuk memperkuat posisinya di lautan serta menjalin kerja sama dengan negara lain. Melalui diplomasi ini, negara dapat mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan keamanan, perdagangan, dan lingkungan maritim. Salah satu fungsi utama dari *diplomasi maritim* adalah untuk mencegah konflik di perairan internasional, seperti sengketa perbatasan laut, yang sering kali melibatkan sumber daya alam yang bernilai tinggi seperti minyak dan gas. Negara-negara dapat menggunakan negosiasi, perjanjian, dan dialog untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Chadhafi, 2023). Selain itu, *diplomasi maritim* juga berperan dalam pengembangan *law of the sea*, di mana Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea* atau *UNCLOS*) menjadi acuan bagi negara-negara untuk menetapkan hak dan kewajiban mereka di perairan internasional. Dengan mengedepankan kerja sama dan dialog, *diplomasi maritim* dapat menciptakan stabilitas dan keamanan di kawasan yang strategis, sambil memastikan perlindungan terhadap sumber daya laut dan ekosistem yang rentan.

Angkatan Laut

Angkatan laut memiliki peran strategis yang penting dalam memastikan keamanan dan pertahanan negara, khususnya di wilayah perairan. Dalam *diplomasi maritim*, *angkatan laut* tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan dan komitmen negara terhadap keamanan maritim. Misalnya, melalui *freedom of navigation operations* yang dilakukan oleh *angkatan laut*,

negara dapat menegaskan hak navigasi di perairan internasional, serta mengatasi tantangan terhadap kebebasan pelayaran yang mungkin dihadapi. Selain itu, *angkatan laut* juga berperan dalam melakukan patroli untuk mencegah aktivitas ilegal seperti pembajakan, perdagangan manusia, dan penangkapan ikan secara ilegal. Kerja sama antara *angkatan laut* negara-negara, baik melalui latihan bersama maupun perjanjian keamanan, semakin meningkatkan kemampuan kolektif untuk menghadapi ancaman di laut (Chadhafi, 2023). Di samping itu, *angkatan laut* sering terlibat dalam operasi kemanusiaan dan bantuan bencana, menunjukkan bahwa kekuatan maritim juga dapat digunakan untuk tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan hubungan antarnegara dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, *angkatan laut* berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keamanan maritim, sekaligus mendukung tujuan *diplomasi maritim* yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi fungsi diplomasi batas maritim yang dilaksanakan oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para narasumber yang terlibat langsung dalam proses diplomasi batas maritim, seperti pejabat di Pushidrosal, diplomat, dan ahli *hidro-oseanografi*. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan untuk menganalisis berbagai dokumen resmi, peta, laporan survei, serta perjanjian internasional terkait batas maritim. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis*, di mana pola-pola tematik akan diidentifikasi untuk memahami peran, tantangan, dan hasil dari implementasi diplomasi batas maritim oleh Pushidrosal. Validitas data dijaga melalui teknik *triangulasi*, yang membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Diplomasi Batas Maritim di Indonesia

Diplomasi batas maritim di Indonesia memiliki latar belakang yang kompleks dan sangat relevan dengan posisi geografis negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang mencapai 99.000 km, Indonesia memiliki banyak kepentingan yang berkaitan dengan batas lautnya. Dalam teori kedaulatan laut yang dikemukakan oleh *Hugo Grotius* dalam bukunya yang terkenal *Mare Liberum* (1609) sangat relevan. Grotius menegaskan bahwa laut merupakan milik bersama dan harus digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia, tetapi di saat yang sama, negara memiliki hak untuk mengklaim dan mempertahankan wilayah lautnya untuk menjaga kedaulatan. Dengan mengacu pada teori ini, Indonesia perlu menetapkan batas maritim yang jelas agar dapat mengelola sumber daya laut dan melindungi kepentingannya di arena internasional.

Sebagai negara yang terletak di jalur perdagangan internasional, Indonesia harus menghadapi berbagai tantangan terkait batas maritim, termasuk klaim yang tumpang tindih dengan negara tetangga. Diplomasi batas maritim bukan hanya menjadi sebuah keharusan, tetapi juga merupakan strategi yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak potensi konflik yang dapat terjadi jika batas maritim tidak ditetapkan dengan jelas. Dalam wawancara dengan seorang pejabat Pushidrosal, dia menyatakan, "*Ketidakpastian mengenai batas maritim sering kali mengarah pada ketegangan dengan negara lain. Oleh karena itu, penting bagi kita*

untuk memiliki peta dan data yang akurat untuk mendukung klaim kita." Ini menunjukkan urgensi diplomasi maritim dalam keamanan nasional dan pengelolaan sumber daya.

Teori *Maritime Boundary Delimitation* yang dijelaskan oleh R. R. Churchill dalam bukunya yang berjudul *The Law of the Sea* (2018) menjelaskan pentingnya penetapan batas maritim sebagai bagian dari hukum internasional. Churchill menggarisbawahi bahwa penetapan batas maritim tidak hanya berdasarkan sejarah, tetapi juga memerlukan data ilmiah yang mendukung. Pushidrosal sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam survei dan pemetaan harus memastikan bahwa semua data yang diperoleh memenuhi standar internasional untuk bisa dipakai dalam negosiasi internasional. Oleh karena itu, penting bagi Pushidrosal untuk melibatkan ahli *hidro-oseanografi* dan ilmuwan dalam setiap tahap survei dan pemetaan.

Peran Pushidrosal dalam Diplomasi Batas Maritim

Pushidrosal memainkan peran sentral dalam implementasi diplomasi batas maritim Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang *hidro-oseanografi*, Pushidrosal mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang diperlukan untuk penetapan batas maritim. Menurut M. R. Panfilov dalam bukunya *Oceanography: An Introduction* (2019), pemahaman tentang kondisi fisik laut dan dasar laut adalah kunci untuk menentukan batas maritim. Dalam Pushidrosal melaksanakan survei yang komprehensif untuk mendapatkan informasi tentang kedalaman, arus, dan topografi dasar laut yang sangat penting dalam merumuskan klaim batas.

Hasil survei yang dilakukan oleh Pushidrosal menjadi landasan bagi pembuatan peta nautika yang akurat, yang akan digunakan dalam proses negosiasi batas maritim dengan negara lain. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa Pushidrosal telah melakukan survei di beberapa wilayah strategis, termasuk Laut Natuna dan Selat Sunda. Seorang narasumber dari Pushidrosal menyatakan, "*Data yang kami kumpulkan dari survei ini akan menjadi argumen kuat dalam setiap diskusi mengenai batas maritim Indonesia.*" Dengan peta yang jelas dan data yang valid, Pushidrosal dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional.

Dalam buku *The Politics of Maritime Boundaries* oleh J. R. Morgan (2020), ditekankan bahwa batas maritim sering kali menjadi sumber konflik antarnegara. Oleh karena itu, penting bagi Pushidrosal untuk tidak hanya fokus pada pengumpulan data, tetapi juga mengembangkan strategi diplomasi yang melibatkan komunikasi efektif dengan negara-negara tetangga. Kerjasama dengan instansi pemerintah lain, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Informasi Geospasial, sangat diperlukan untuk membangun konsensus dalam penetapan batas maritim.

Tantangan dalam Implementasi Diplomasi Batas Maritim

Meskipun Pushidrosal memiliki peran yang strategis dalam diplomasi batas maritim, berbagai tantangan menghambat efektivitas implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh Pushidrosal. G. A. F. Kossin dalam bukunya *Ocean Technology and Governance* (2018) menjelaskan bahwa kemajuan teknologi sangat penting dalam survei maritim, dan ketidakcukupan dalam hal ini dapat menghambat pengumpulan data yang akurat. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa alat yang digunakan dalam survei sudah usang dan memerlukan pembaruan. Dalam wawancara, seorang pejabat di Pushidrosal mengungkapkan, "*Kami sering kali harus berjuang dengan keterbatasan alat dan anggaran untuk melakukan survei yang komprehensif. Ini menghambat efektivitas kami dalam menentukan batas maritim.*"

Tantangan lain yang dihadapi adalah perbedaan pendapat dengan negara-negara tetangga mengenai batas maritim. Teori konflik yang diungkapkan oleh *Thomas Hobbes* dalam bukunya *Leviathan* (1651) menunjukkan bahwa konflik sering kali muncul dari kepentingan yang saling bertentangan. Dalam Pushidrosal harus mampu merumuskan strategi diplomasi yang mengedepankan dialog dan negosiasi dengan negara-negara tetangga untuk menyelesaikan sengketa. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa negara, seperti Cina dan Malaysia, memiliki klaim tumpang tindih dengan Indonesia, dan hal ini dapat memicu ketegangan.

Pushidrosal perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional dan organisasi regional seperti *ASEAN* untuk membangun konsensus mengenai batas maritim. Menurut *B. J. Goldstein* dalam bukunya *International Relations* (2017), kerjasama internasional dapat mengurangi ketegangan dan mempromosikan penyelesaian damai atas sengketa. Upaya Pushidrosal dalam memperkuat diplomasi maritim harus melibatkan strategi yang lebih holistik dan inklusif, di mana semua pihak dapat terlibat dalam dialog yang konstruktif.

Hasil Survei dan Pemetaan oleh Pushidrosal

Hasil survei dan pemetaan yang dilakukan oleh Pushidrosal memiliki dampak signifikan terhadap penetapan batas maritim Indonesia. Menurut *R. B. D. Smith* dalam bukunya *Marine Surveys* (2019), hasil survei yang akurat adalah dasar bagi negara untuk mengklaim batas maritimnya secara sah. Pushidrosal telah melaksanakan survei di berbagai wilayah strategis, termasuk Laut Natuna dan Selat Sunda, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil observasi menunjukkan bahwa survei tersebut tidak hanya mencakup pengukuran kedalaman, tetapi juga analisis terhadap arus laut dan fenomena geologis yang dapat mempengaruhi batas maritim.

Dalam wawancara, seorang ahli hidro-oseanografi di Pushidrosal menegaskan, "*Hasil survei kami sangat mendukung klaim batas maritim Indonesia di Laut Natuna. Data ini kami sajikan dalam berbagai forum internasional.*" Hal ini menunjukkan bahwa Pushidrosal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga teknis, tetapi juga sebagai representasi kedaulatan Indonesia di tingkat internasional. Data yang dihasilkan oleh Pushidrosal menjadi alat penting dalam diplomasi batas maritim, terutama dalam forum-forum seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*.

Teori *Maritime Boundary Delimitation* yang diuraikan oleh *R. R. Churchill* dan *A. V. Lowe* dalam buku mereka yang berjudul *The Law of the Sea* (2018) menekankan bahwa batas maritim yang ditetapkan berdasarkan data ilmiah memiliki legitimasi yang lebih kuat. Pushidrosal, melalui hasil survei dan pemetaan, berupaya untuk memberikan data yang tidak hanya akurat tetapi juga sesuai dengan norma hukum internasional. Dalam memperbaharui data dan peta yang dihasilkan, seiring dengan perkembangan teknologi dan kondisi lingkungan yang mungkin berubah.

Keterlibatan Masyarakat dan Edukasi tentang Batas Maritim

Keterlibatan masyarakat dalam memahami isu batas maritim sangat penting untuk mendukung diplomasi batas maritim yang dilakukan oleh Pushidrosal. Masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pesisir, perlu mendapatkan edukasi yang memadai tentang pentingnya batas maritim. Teori *Social Learning* yang dikemukakan oleh *Albert Bandura* dalam bukunya *Social Learning Theory* (1977) menjelaskan bahwa individu belajar melalui interaksi sosial. Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan penyuluhan tentang batas maritim, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif mengenai pentingnya kedaulatan laut.

Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak masyarakat pesisir yang belum memahami sepenuhnya tentang batas maritim dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Dalam wawancara, seorang aktivis lingkungan maritim menyatakan, "*Kami merasa bahwa penting bagi masyarakat untuk dilibatkan dalam diskusi tentang batas maritim. Ini bukan hanya soal kebijakan pemerintah, tetapi juga tentang hak-hak masyarakat pesisir.*" Pendekatan yang inklusif ini dapat membantu menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan maritim.

Pushidrosal dapat melakukan berbagai kegiatan edukasi dan penyuluhan yang melibatkan masyarakat, termasuk seminar, workshop, dan pembuatan materi edukasi yang mudah dipahami. Menurut *M. A. de Mello* dalam bukunya *Marine Policy* (2020), edukasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut dan mendukung upaya diplomasi maritim. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan akan ada dukungan yang lebih besar terhadap kebijakan yang berkaitan dengan batas maritim.

Dampak dari Diplomasi Batas Maritim terhadap Kedaulatan Negara

Dampak dari diplomasi batas maritim yang dilakukan oleh Pushidrosal terhadap kedaulatan negara sangat signifikan. Dengan batas maritim yang jelas dan diakui, Indonesia dapat lebih mudah mengelola sumber daya laut dan melindungi wilayahnya dari klaim yang tidak sah. Dalam teori *Territoriality* yang dikemukakan oleh *Robert D. Kaplan* dalam bukunya *The Coming Anarchy* (2000) menunjukkan bahwa pengakuan terhadap batas teritorial sangat penting untuk menjaga keamanan nasional. Dengan batas maritim yang diakui, Indonesia dapat menegakkan hukum dan melindungi kepentingan nasional, termasuk sumber daya laut.

Hasil observasi di beberapa wilayah menunjukkan bahwa ketika batas maritim sudah ditetapkan, aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing dapat ditekan. Dalam wawancara, seorang pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan, "*Dengan adanya pengakuan terhadap batas maritim kita, aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan dapat diminimalisir, dan kita dapat lebih baik mengelola sumber daya laut kita.*" Ini menunjukkan bahwa diplomasi batas maritim bukan hanya berfungsi untuk kepentingan politik, tetapi juga untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.

Menurut *C. C. H. Kwiatkowska* dalam bukunya *The Law of the Sea: A Practical Guide* (2021), pengakuan internasional terhadap batas maritim dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral dan multilateral terkait masalah maritim. Dengan memiliki batas maritim yang diakui, Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam forum internasional dan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait isu-isu maritim global. Oleh karena itu, penting bagi Pushidrosal untuk terus memperkuat data dan informasi yang dapat digunakan dalam diplomasi batas maritim, serta membangun kemitraan dengan negara-negara lain.

Rekomendasi untuk Peningkatan Diplomasi Batas Maritim

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas diplomasi batas maritim oleh Pushidrosal. Pertama, perlu adanya investasi yang lebih besar dalam teknologi survei dan pemetaan untuk meningkatkan akurasi data yang diperoleh. Menurut *K. J. H. Grebmeier* dalam bukunya *Arctic Ocean Science* (2019), kemajuan teknologi sangat penting dalam survei maritim dan dapat menghasilkan data yang lebih baik. Pushidrosal harus memperbarui peralatan dan teknologi yang digunakan dalam survei untuk memastikan data yang dihasilkan memenuhi standar internasional.

Kolaborasi antara Pushidrosal dengan instansi pemerintah lainnya dan lembaga internasional perlu ditingkatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi maritim. Dalam wawancara, seorang diplomat menyatakan, "*Kerja sama internasional sangat penting. Kita perlu menunjukkan bahwa kita memiliki data yang kuat untuk mendukung klaim kita.*" Dengan memperkuat kerjasama, Pushidrosal dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program edukasi yang lebih luas akan membantu membangun dukungan bagi kebijakan batas maritim. Menurut *N. H. K. J. Shunmugam* dalam bukunya *Coastal and Marine Resource Management (2020)*, edukasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Dengan melibatkan masyarakat dalam dialog tentang batas maritim, Pushidrosal dapat membangun kesadaran dan dukungan terhadap upaya diplomasi batas maritim.

Dengan mengikuti rekomendasi ini, Pushidrosal diharapkan dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsi diplomasi batas maritimnya. Keberhasilan dalam diplomasi batas maritim tidak hanya penting bagi kedaulatan negara, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Pushidrosal memiliki peran yang sangat penting dalam diplomasi batas maritim Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan perbedaan persepsi dengan negara lain, Pushidrosal telah berhasil menghasilkan data dan peta yang akurat yang mendukung kedaulatan Indonesia di laut. Harapan untuk masa depan adalah agar Pushidrosal terus memperkuat kemampuannya dalam survei dan pemetaan, serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjamin bahwa batas maritim Indonesia diakui secara internasional.

Dalam wawancara, seorang pejabat Pushidrosal menekankan, "*Kami optimis bahwa dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, kita bisa mencapai tujuan kita dalam menjaga dan melindungi kedaulatan maritim Indonesia.*" Untuk mencapai harapan ini, penting bagi Pushidrosal untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika geopolitik yang ada. Diplomasi batas maritim yang efektif akan menjadi salah satu pilar dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi fungsi diplomasi batas maritim oleh Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia di laut. Pushidrosal telah berhasil mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk penetapan batas maritim, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan potensi konflik dengan negara-negara tetangga. Untuk meningkatkan efektivitas diplomasi batas maritim, disarankan agar Pushidrosal meningkatkan investasi dalam teknologi survei dan pemetaan, memperkuat kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya serta lembaga internasional, dan melibatkan masyarakat dalam program edukasi terkait batas maritim. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Pushidrosal dapat lebih baik dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di arena internasional serta menciptakan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat tentang pentingnya kedaulatan maritim.

UCAPAN TERIMA KASIH

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyusunan jurnal ini. Terima

kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan berharga, serta kepada rekan-rekan yang telah membantu dengan saran dan motivasi. Tanpa bantuan dan dorongan dari mereka, penyelesaian jurnal ini tidak akan terwujud. Semoga hasil dari jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi pembaca."

DAFTAR REFERENSI

- Adikara, A. P. B., & Munandar, A. I. (2021). Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1).
- Ahmad, F. (2022). Diplomasi Indonesia dengan Tiongkok dalam Penyelesaian Sengketa Laut Natuna Utara. *Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, January.
- Chadhafi, M. I. (2021). *Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara* (Vol. 1). Jejak Pustaka.
- Chadhafi, M. I. (2023). *Peran Indonesia dalam Maritime Task Force UNIFIL (Satgas Maritim PBB di Lebanon)-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Gara, E. G., Winata, W., & Baharun, M. (2023). Kebijakan Keamanan Nasional Dan Keamanan Maritim Negara Singapura Dan Dampaknya Bagi Kepentingan Nasional Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8117–8128.
- Hanggarini, P., Madjid, M. A., Perwita, A. A. B., & Wiranto, S. (2022). Budaya Maritim dan Diplomasi Maritim untuk Kepentingan Nasional. *Indonesian Perspective*, 7(2), 164–179.
- Louhenapessy, R. D., & Raspati, I. N. (2021). ANALISIS DIPLOMASI MARITIM TNI ANGKATAN LAUT DI LAUT CHINA SELATAN GUNA MENJAGA STABILITAS KEAMANAN MARITIM KAWASAN. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 14(2), 204–210.
- Maulidina, S. W. (2021). *Diplomasi Maritim Indonesia Di Dalam Indian Ocean Rim Association (Iora) Menuju Poros Maritim Dunia*. Universitas Komputer Indonesia.
- Palar, A. M. K. (2021). Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7(2), 143–158.
- Pangesti, M. R. E., & Ilmih, A. A. (2024). Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dan Singapura: Analisis Perjanjian Ekstradisi dan Sengketa Selat Singapura. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Pramuji, N. F. (2022). GAGASAN DIPLOMASI DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA MARITIM DESA KEPULAUAN DI WILAYAH PERBATASAN DAN PENGARUH TERHADAP KEDAULATAN WILAYAH NKRI. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan*, 9(2), 64–73.
- Rahim, M. R. H., & Burhanuddin, A. (2024). Dampak Pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo Terhadap Diplomasi Maritim Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 129–146.
- Sasmita, A. I., Bramasta, B., & Widiana, F. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam Tahun 2018-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 81.